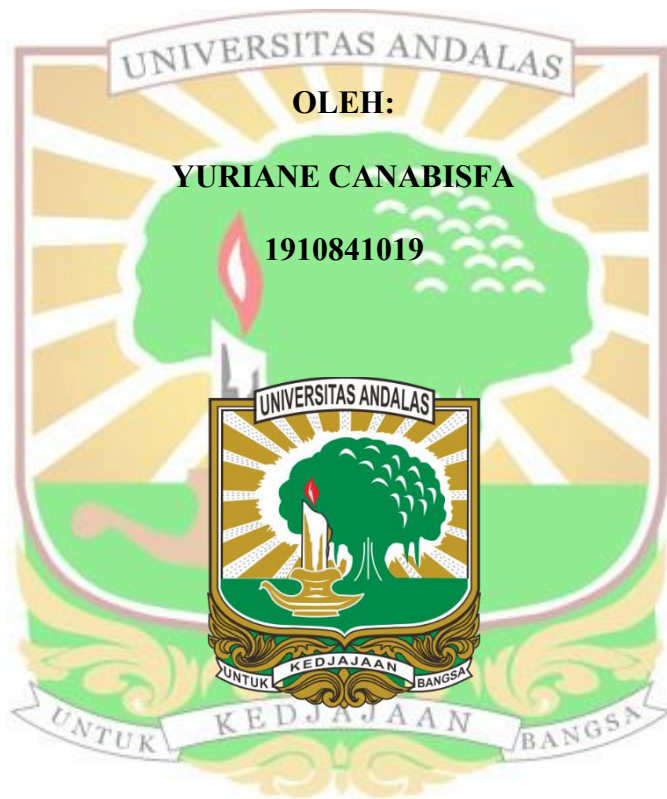


**KEGAGALAN KEBIJAKAN
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DI NAGARI SARILAMAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

ABSTRAK

Yuriane Canabisfa, NIM 1910841019, Kegagalan Kebijakan Pendirian BUMDes di Nagari Sarilamak, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2024. Dibimbing oleh Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc dan Dr. Ria Ariany, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 272 halaman dengan referensi menggunakan 14 buku teori, 10 buku metode, 1 skripsi, 11 jurnal, 2 dokumen, 5 peraturan, dan 6 website.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang pendirian BUMDes yang menjadi landasan hukum pembentukan usaha-usaha dengan memanfaatkan potensi nagari dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, semenjak dikeluarkan pada tahun 2017 hingga dilaksanakan revisi pada tahun 2022, kebijakan ini tampaknya tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa unit usaha yang sudah mulai dikelola tidak menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga tidak ada usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab kegagalan kebijakan pendirian badan usaha milik desa di Nagari Sarilamak.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Pada teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan ialah triangulasi sumber serta analisis data oleh Miles dan Huberman.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori derajat kegagalan kebijakan oleh Allan McConnell yang memandang kebijakan dari 3 aspek yakni: aspek proses, aspek program dan aspek politik. Hasil penelitian membuktikan pada aspek proses pembuatan kebijakan pendirian BUMDes belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian dalam aspek program hasil penelitian menunjukkan tujuan yang tidak tercapai. Terakhir, aspek politik yang memperlihatkan terjadinya kegagalan implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh buruk terhadap citra pemerintah. Menurut spektrum kegagalan kebijakan oleh McConnell, tingkat kegagalan paling buruk terjadi pada aspek kebijakan sebagai program atau pelaksanaan kebijakan karena secara dominan mengalami kegagalan langsung. Penyebab kegagalan kebijakan pendirian BUMDes antara lain terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mewajibkan BUMDes harus berbadan hukum, pembuatan kebijakan tidak sesuai standar legal drafting, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Nagari Sarilamak dengan pengurus BUMDes, serta sumber daya manusia sebagai pengurus BUMDes dan masyarakat dari segi kualitas masih kurang.

Kata Kunci: Kegagalan Kebijakan Publik, Kegagalan Implementasi, Kebijakan Pendirian BUMDes.

ABSTRACT

Yuriane Canabisfa, NIM 1910841019, Failure of BUMDes Establishment Policy in Nagari Sarilamak, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang 2024. Supervised by Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc and Dr. Ria Ariany, M.Si. This thesis consists of 272 pages with references using 14 theory books, 10 method books, 1 thesis, 11 journals, 2 documents, 5 regulations, and 6 websites.

This research is motivated by the policy of Village Regulation Number 6 of 2022 concerning the establishment of BUMDes which is the legal basis for the formation of businesses by utilizing the potential of the village and community participation. However, since it was issued in 2017 until the revision was carried out in 2022, this policy does not seem to have a significant impact on people's lives. Several business units that have begun to be managed have not shown satisfactory results so that there are no sustainable businesses. Thus, this study aims to determine and analyze the causes of the failure of the policy of establishing a village-owned business entity in Nagari Sarilamak.

The research approach used is descriptive qualitative with a case study research design. Then the data collection technique was carried out through interviews supplemented by observation and documentation. The informant selection technique used the purposive sampling method. Furthermore, the data validity technique used by the researcher is source triangulation and data analysis by Miles and Huberman.

The analysis in this study uses the theory of the degree of policy failure by Allan McConnell who views policies from 3 aspects, namely: process aspects, program aspects and political aspects. The results of the study prove that in the aspect of the process of making the BUMDes establishment policy, it has not been implemented in accordance with existing procedures. Then in the program aspect, the research results show that the objectives have not been achieved. Finally, the political aspect that shows the failure of policy implementation has had a negative impact on the government's image. According to the spectrum of policy failure by McConnell, the worst level of failure occurs in the policy aspect as a program or policy implementation because it predominantly experiences direct failure. The causes of the failure of the BUMDes establishment policy include the issuance of Government Regulation Number 11 of 2021 which requires BUMDes to be a legal entity, policy making does not comply with legal drafting standards, lack of coordination between the Sarilamak Nagari Government and BUMDes management, and human resources as BUMDes management and the community in terms of quality are still lacking.

Keywords: Public Policy Failure, Implementation Failure, Policy of BUMDes Establishment.